

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya¹. Paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia memiliki makna bahwa kedaulatan ditangan rakyat². Penyaluran demokrasi secara langsung dilakukan melalui Pemilihan Umum atau Pemilu untuk memilih pemimpin (presiden, gubernur, walikota dan bupati) dan legislatif atau anggota lembaga perwakilan³. Pemilihan legislatif merupakan suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung.

Pada pemilihan legislatif tahun 2009, dengan berdasarkan undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008, untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Melalui sistem ini, para pemilih tidak hanya memilih partai politik namun juga memilih calon legislatif. Penetapan calon legislatif terpilih pada suatu daerah dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif atau anggota lembaga perwakilan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan bahwa Pemilu ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 65.

² *Ibid* ,Hlm. 66.

³ *Ibid* ,Hlm. 68.

Melalui pemilihan umum dinamika politik di Indonesia dapat dilihat dari pesta demokrasi yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilihan anggota legislatif merupakan salah satu media masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih dan menentukan figur yang cocok untuk memimpin atau mewakilinya di lembaga legislatif. Pemilihan juga sebagai media perwujudan demokrasi yaitu memilih dengan berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dimana kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi⁴.

Pada pemilihan legislatif tahun 2004 lalu merupakan pemilihan pertama dalam memilih anggota dewan perwakilan daerah (DPD-RI). Dimana pada pemilu sebelumnya DPD bukan merupakan lembaga negara. Namun saat itu DPD hanyalah fraksi keterwakilan daerah⁵. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat tanpa mewakili suatu kelompok partai politik manapun⁶. DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia⁷. DPD menjadi forum mediasi aspirasi masyarakat dan daerah serta kepentingan lainnya. Jika dilihat dari ketatanegaraan DPD juga hadir untuk menguatkan sistem parlemen dalam proses legislasi⁸.

Kehadiran DPD di parlemen merupakan bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik⁹. Yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan

⁴Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta) 2008.

⁵Kompas.com, "DPD : Latar Belakang, Fungsi dan Wewenang".
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/100000469/dpd--latar-belakang-fungsi-dan-wewenangnya?page=all> Diakses Pada 06 September 2022. Pukul 10.57 WIB

⁶Laman Resmi DPR-RI, "Program Legislasi Nasional, Deskripsi Konsepsi DPD".
<https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51> Diakses Pada 06 September 2022. Pukul 11.16 WIB

⁷Mahyu Darma, *Pentingnya Keberadaan Dpd Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia*. (Jurnal Galuh Justisi: Fakultas Hukum Universitas Galuh) Vol.4, No.1. 2016. Hlm. 3

⁸ *Ibid*, Hlm. 4

⁹A.M. fatwa, "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945" (Jakarta:Kompas penerbit, september 2009), Hlm. 314

indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini¹⁰. Maka DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI¹¹.

DPD RI setidaknya memiliki 3 fungsi yang terbatas di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD RI ini berkaitan erat dengan system saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹². Untuk memperjelas peran DPD RI sebagai salah satu lembaga legislatif maka hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3)¹³. UU tersebut mengatur tentang fungsi dan kewenangan dari lembaga negara Indonesia. Optimalisasi fungsi DPD secara kelembagaan mutlak dilakukan karena ketentuan yang terdapat dalam pasal 22D UUD 1945 yang mengatur fungsi dan kewenangan DPD sebagai lembaga legislasi negara sangat terbatas, yaitu hanya mengusulkan serta membahas dan bukan sebagai pemutus. Keberadaan DPD secara kelembagaan selama ini, sangat tergantung undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang di dalam menetapkan APBN¹⁴.

Kehadiran lembaga baru ini mendorong banyak kalangan tokoh di berbagai daerah untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan DPD-RI. Lembaga negara yang tidak terikat kepentingan atas suatu kelompok ideologi tertentu seperti partai politik menjadi alasan kenapa DPD menjadi arah berlabuh para mantan kader partai yang tak kuat terikat pada kepentingan suatu kelompok dan para birokrat yang hendak melangkah di gelanggang

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 317

¹¹ Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, Konstusi republik Indonesia, Hlm.3

¹² Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3)

¹³ Robby Akbar, *"Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah"*, (Skripsi Htn Uin Suska, 2020)

¹⁴ Budi Aspani, *"Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia"*. (Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2017) Vol. 15, No 3, Hlm. 330

politik praktis¹⁵. Sama halnya dengan salah satu tokoh politik muda dari Provinsi Jambi ini yang sebelumnya mantan dari anggota partai, anggota DPRD serta ketua DPRD mencoba peruntungan di pemilihan DPD-RI tahun 2019 lalu.

Ria mayang sari seorang tokoh politik perempuan muda dari Kabupaten Bungo yang berhasil memenangkan pemilihan DPD-RI untuk pertama kalinya ke senayan dengan suara terbanyak pada daerah pemilihan Provinsi Jambi. Ria yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bungo pada tahun 2009-2014 dan di lanjut lagi sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo pada periode berikutnya 2014-2019. Merupakan sosok baru pada pemilihan DPD tahun 2019 lalu, berbeda dengan beberapa lawan politiknya yang sudah beberapa kali mencoba bahkan ada yang kembali mencalonkan diri di periode selanjutnya. Berikut data perolehan suara pada pemilihan DPD-RI Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

Tabel 1.1
Data Perolehan Suara Pemilihan Calon DPD-RI Terpilih
Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

Nama	Total Prolehan Suara
Ria Mayang Sari	241. 356
M. Syukur	233.614
Elviana	198.193
Sum Indra	156.196

**Sumber: KPU Provinsi Jambi*

Dari keempat tokoh yang berhasil terpilih dan mewakili Provinsi Jambi ke senayan di atas, Ria merupakan salah satu pendatang baru namun mampu memeperoleh suara terbanyak. Seperti M. Syukur pada posisi kedua yang merupakan anggota DPD RI tiga periode mampu dikalahkan oleh Ria Mayang Sari padahal jika di dibandingkan dengan Ria,

¹⁵ Mahyu Darma, *Op.cit.* Hlm 4

Syukur lebih muda dalam memperoleh suara terbanyak sebab suda memiliki pengalaman serta nama di pemilihan DPD-RI. Selanjutnya ada nama Elviana yang merupakan perempuan kedua yang mewakili senator DPD Jambi ke senayan sama seperti Syukur, Elviana juga merupakan tokoh poltik yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jambi, merupakan mantan anggota DPR-RI dua periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014 kemudian juga anggota DPD dua periode dari tahun 2014-2019 dan terpilih kembali untuk 2019-2024. Dengan *track record* perjalanan politik yang gemilang seharusnya bukan perkara susah bagi Elviana dalam memperoleh suara terbanyak namun tetap kalah dari Ria Mayang Sari.

Selanjutnya di posisi terakhir ada Sum Indra yang berhasil mewakili Jambi pada pemilihan DPD tahun 2019 ke Senayan, sama seperti Ria ia juga merupakan pendatang baru pada pemilihan DPD-RI tahun 2019. Kemenangannya sebagai anggota DPD-RI juga tidak terlepas dari *track record* nya yang sebumnya juga pernah menjabat sebagai wakil walikota Jambi tahun 2008-2013 dan juga merupakan cucu dari Nurdin Hamza saudagar kaya yang merupakan tokoh masyarakat Jambi. Selain itu Sum Indra juga merupakan keponakan dari mantan Gubernur jambi Zulkifli Nurdin dan sepupu dari Zumi Zola yang juga merupakan mantan Gubernur Jambi.

Jika dilihat dari para figur yang berhasil mewakili Jambi pada pemilihan DPD-RI tahun 2019 diatas, sosok Ria Mayang bukanlah tokoh yang begitu berpengaruh jika di bandingkan dengan para figur yang *notabene* berpengalaman dan bebrapa kali sudah meniti karir nya di dewan perwakilan daerah. Untuk itulah kemenangan Ria Mayang Sari dengan perolehan suara terbanyak dari para lawan nya yang dapat dikatakan para senior dengan *track record* yang gemilang menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti pola strategi kemenangan yang dilakukan oleh Ria Mayang Sari. Untuk itu peneliti menarik

bagaimana Modal politik sebagai hipotesis sementara yang dilakukan Ria Mayang dalam memperoleh kemenangan pada pemilihan DPD-RI lalu.

Keterpilihannya Ria Mayang sari ini dalam setiap pemilihan umum tentunya tidak terlepas dari Modal politik serta sosialnya kepada masyarakat tentunya Ria telah mempersiapkan strategi yang matang sebelum melangkah ke senayan sebagai perwakilan Jambi dalam pemilihan DPD-RI. Selain dikenal sebagai putri dari mantan wakil gubernur Jambi Fachrori Umar periode 2010-2015 yang juga mantan Gubernur Jambi 2016-2019. Sosok Ria telah menjadi tokoh karismatik di kalangan masyarakat Kabupaten Bungo dengan parasnya yang anggun dan ayu serta kerendahan hatinya serta sosok yang mampu berbaur dengan masyarakat kecil, *Privilage* terlahir dari keluarga tokoh masyarakat Bungo juga menjadi poin penting keberhasilan Ria saat ini.

Namun perlu diketahui jika pemilihan dewan perwakilan daerah memiliki perbedaan dengan pemilihan dewan perwakilan rakyat. Pasalnya ada beberapa tokoh atau perwakilan yang mampu meraih suara banyak untuk mewakili daerahnya ke kursi DPD-RI di Senayan¹⁶. Tentunya ini merupakan kesulitan yang perlu untuk diantisipasi dan dipersiapkan oleh para calon yang hendak memilih berkompetisi di pemilihan DPD-RI. Seperti yang dilakukan oleh Ria Mayang sari mengantisipasi tersebut dengan memanfaatkan Modal politik sebagai alat dan strategi pem-*branding* diri darinya.

Berbeda dengan Ria Mayang Sari yang telah memiliki *track record* yang sangat bagus dan juga merupakan anak dari salah satu figur tokoh masyarakat dan politik Provinsi Jambi menjadikannya dapat berjalan mudah untuk mendapatkan kemenangan itu. Namun perlu ada strategi yang dilakukan Ria Mayang Sari kehadiran hak istimewa serta modal yang memumpuni ini menjadi faktor kemenangan Ria untuk mendapatkan tempat di hati

¹⁶Bandingkan Gunawan A. Tauda, Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Lokal Serentak. (Universitas Khairun, 2020) Hlm. 128

masyarakat Bungo dan Provinsi Jambi. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis faktor kemenangan Ria melalui beberapa faktor yang telah di jelaskan diatas sehingga Ria mampu memperoleh suara terbanyak pada pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah dari pada semua calon yang berasal di Provinsi Jambi yang mengikuti kontestasi pemili pada 2019 lalu.

Tampilan yang dapat menarik hati masyarakat menjadi penting dalam dunia politik. Tampilan tersebut sering kali dianggap sebagai realita dalam kehidupan politik, sehingga menjadi begitu penting. Untuk membentuk tampilan, para politikus kerap melaksanakan Modal politik. Proses pembentukan merek diri digunakan untuk menimbulkan persepsi dalam benak masyarakat atas beragam aspek yang ada pada individu. Aspek-aspek yang dilihat ialah kepribadian, kemampuan, serta nilai-nilai Sangkut paut dari seluruh aspek di atas pun menjadi penting untuk diketahui¹⁷. Bagaimana keseluruhan aspek yang ada dapat menimbulkan persepsi positif dalam benak masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai sarana yang berguna untuk memasarkan citra diri dari tokoh tersebut.

Pada tahap kampanye, menjadi tahapan penting bagi setiap kandidat untuk benar-benar memengaruhi masyarakat agar memilih kandidat tersebut. Untuk itu bentuk Modal politik, kelebihan dan kekurangan akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih, Kampanye yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran politik (marketing politik), harus dipikirkan matang-matang oleh setiap kandidat atau tim suksesnya. Di tahap ini semua kandidat dan tim suksesnya harus bekerja keras untuk bisa memperoleh suara yang banyak dan bisa menang dalam pemilihan yang digelar. Kampanye dalam sebuah pemilihan, baik pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah harus diatur dengan strategi yang baik. Kampanye merupakan

¹⁷ Haroen D. *Personal Branding: Kunci Kesuksesan Anda Berkiprah di Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.

sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas serta popularitas. Peningkatan elektabilitas dan popularitas tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara dalam pemilihan.

Seperti yang telah banyak dilakukan para politikus di Indonesia tak perlu disebutkan satu persatu, kampanye dengan cara yang kreatif dan suksesnya mampu lebih efektif dalam menaikkan suatu figur seseorang tokoh agar begitu lebih dikenal oleh masyarakatnya. Pola Modal politik melalui kampanye dan pengenalan lebih intens ke masyarakat dilakukan oleh salah satu tokoh politik perempuan di Provinsi Jambi dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum pada 2019 lalu, tepatnya pada pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD).

Studi pada penelitian ini berangkat dari hipotesa sementara peneliti yang melihat personal branding Ria Mayang dalam memenangkan pemilihan DPD-RI tahun 2029 lalu. Fenomena Modal politik dalam kemenangan suatu calon juga dijelaskan pada penelitian terdahulu. Pertama peneliti menggunakan penelitian dengan judul *“Strategi Pemenangan Anggi Noviah Dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019”*¹⁸. Penelitian ini ditulis oleh Lilis Kholidah. Penelitian ini tentang strategi kemenangan Anggi Noviah dalam pemilihan calon legislatif Kabupaten Indramayu tahun 2019. Anggi Noviah merupakan caleg termuda dari PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu yang terpilih menduduki kursi DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 2.745 suara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Kedua penelitian tentang *“Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”*. Yang diteliti oleh Kuncoro Puspito¹⁹. Penelitian ini

¹⁸Bandingkan Lilis Kholidah, *“Strategi Pemenangan Anggi Noviah Dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019”*. (Universitas Negeri Semarang : Skripsi). Tahun 2020

¹⁹Bandingkan Kuncoro Puspito, *“Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”*. (Departemen Politik Pemerintahan Undip) Tahun 2019.

membahas mengenai strategi politik dalam kemenangan Danie Budi Tjahyono, calon legislatif pada pemilu tahun 2019. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana strategi pemenangan yang diterapkan oleh Danie Budi Tjahyono pada Pemilihan Legislatif Provinsi Jawa Tengah, serta mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga pada akhirnya Danie Budi Tjahyono dapat merebut kursi DPRD Dapil 1 Provinsi Jawa Tengah.

Dari dua penelitian terdahulu di atas peneliti mencoba menghadirkan sebuah analisa terhadap kemenangan tokoh politik perempuan Jambi yang berhasil memperoleh suara terbanyak yang memenangkan pemilihan dewan perwakilan daerah dan mewakili Provinsi Jambi di senayan. Kemudian melalui penelitian ini peneliti mencoba menggali bagaimana sosok Ria Mayang Sari mem-*branding* dirinya serta keterkaitan faktor keluarga serta kekuatan politik yang telah ia bangun di Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi dalam memenangkan pemilihan DPD-RI, untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian ini. ***“Kemenangan Ria Mayang Sari Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Provinsi Jambi Tahun 2019-2024”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun rumusan masalah. Bagaimana strategi kemenangan yang dilakukan Ria Mayang Sari dalam pemilihan DPD-RI tahun 2019.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi kemenangan yang di lakukan Ria Mayang Sari kepada masyarakat dalam memenangkan pemilihan DPD-RI tahun 2019.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dalam kemenangan Ria Mayang Sari pada pemilihan DPD-RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pembaca, baik yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi teoritis bagi ilmu politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, misalnya dalam menganalisis mengenai kemenangan salah satu calon dalam pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor kemenangan calon dalam pemilihan umum dalam kajian dalam ilmu Politik.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi payung peneliti dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang peneliti gunakan :

1.5.1 Modal politik

Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi)²⁰.

Di dalam proses pemilu sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pemilu akan manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi didalam pemilu langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif dan peserta pemilu itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam menetapkan strategi kemenangan pemilu tidak hanya menyesuaikan kondisi pemilu itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat

²⁰ Bunga, Augusto, Sekilas tentang pengertian modal, dalam <http://rumahdesain.revolusi.blogspot.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 13.30 wib.

baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. Berikut modal politik yang harus dipenuhi oleh para aktor politik dalam mengikuti konstitusi politik atau pemilu.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan penelitian mengenai modal politik tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini. Adapun menurut Kimberly L. Casey, modal politik yaitu, jumlah dari kombinasi jenis lain modal untuk tindakan politik atau pengambilan investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi). Casey melihat ada 7 modal politik yaitu, modal kelembagaan, modal sosial, modal manusia, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal budaya²¹. Berikut kekuatan modal politik yang harus dimiliki oleh para aktor politik dalam menunjang keberhasilan kekuatan politik yang ingin dibangun menurut Kimberly L. Casey:

1.5.1.1 Modal Kelembagaan

Modal kelembagaan, Hubungan terkuat antara pencalonan dan lembaga-lembaga politik adalah partai politik. Partai politik juga memungkinkan kandidat untuk mendefinisikan posisi kebijakan dan ideologinya, apakah ia mendukung posisi partai atau tidak²². Dukungan kandidat untuk posisi partai mungkin memiliki beberapa efek pada dukungan partai untuk calon juga. Serta juga akan berdampak pada pencalonannya oleh dimana partai diposisikan positif atau negatif dibandingkan dengan partai lain dalam sebuah pemilu.

²¹Kimberly L. Casey.2008. *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. Paper Presented at the Illinois State University Conference for Student of Political Science. University of MissouriSt.Louis, jurnal

²² *Ibid*, Kimberly L. Casey Hlm. 11

1.5.1.2 Modal Sosial

Modal sosial, Kimberly L. Casey mendefinisikan modal sosial diukur dalam tiga cara. Dukungan kelompok kolektif calon diukur dengan jumlah dukungan kandidat lain menerima.²³ Pengukuran pertama ini juga akan menyertakan dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa pada dukungan kolektif, bukan hanya mewakili individu memberikan dukungan tersebut. Pengukuran kedua menunjukkan ikatan pribadi calon-kelompok-kelompok di mana kandidat langsung berpartisipasi di luar partai politik.

1.5.1.3 Modal Manusia

Modal manusia adalah sumber daya dalam kepemilikan aktor yang bisa membuat keputusan latihan otoritas tentang penggunaan mereka dan disposisi. Cesley menyatakan bahwa modal manusia adalah orang-orang membawa uang untuk berinvestasi dalam pekerjaan mereka. Pekerja, bukan organisasi, adalah pemilik modal manusia. Davenport membagi modal manusia kepada ke tiga elemen dasar: kemampuan, perilaku, dan usaha, dikombinasikan dengan waktu, sebagai elemen keempat. Kemampuan didefinisikan terdiri dari tiga komponen, pengetahuan, perintah dari suatu tubuh fakta yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, keterampilan, fasilitas dengan sarana dan metode kemahiran dalam serangkaian kegiatan atau bentuk-bentuk pekerjaan.

1.5.1.4 Modal Ekonomi

Modal ekonomi, Untuk pengukuran tertentu yang disarankan di sini, modal ekonomi diukur semata-mata sebagai kekayaan pribadi, atau lebih tepatnya, potensi bahwa seseorang memiliki finansial untuk berkontribusi pada pencalonan mereka sendiri.

²³ *Op.Cit* Kimberly L Casley. Hlm. 19

1.5.1.5 Modal simbolik dan Kebudayaan

Modal Budaya Pierre Bourdieu mengkonseptualisasikan modal budaya sebagai produk dari praktek sosial dan reproduksi sosial dari simbol tersebut dan makna yang memungkinkan kelas atas untuk melakukan budaya dominan mereka melalui reproduksi siklus kekerasan simbolik ideologi. Modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya dan dihasilkan sebagai produk dominasi

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu bekal kandidat untuk bisa memenangkan suatu kontestasi politik²⁴. Seorang kandidat yang mempunyai modal politik yang lebih besar dari kandidat lainnya, juga akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam suatu kontestasi politik. Kajian mengenai modal politik semakin menarik untuk dikaji lebih jauh karena ia mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dukungan yang diberikan oleh suatu lembaga politik dalam hal ini ialah partai politik dan koalisinya terhadap kemenangan seorang kandidat. Sehingga, peneliti dalam hal ini memahami bahwa tanpa dukungan dari suatu lembaga politik akan sulit bagi seseorang untuk maju ataupun menang dalam suatu pertarungan pemilihan umum legislatif (Pileg), dikarenakan melalui modal politik kelembagaan ini calon kandidat bisa dengan mudah untuk mendapat hati masyarakat dalam pemilihan umum.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya

²⁴*Op.Cit.* Miriam Budiarjo, Hlm.

untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan²⁵. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan lain, Bourdieu membagi empat modal; pertama, adalah modal ekonomi yang terdiri dari alat-alat produksi, materi dan uang. Kedua, modal budaya yang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun keluarga. Ketiga, modal sosial atau jaringan yang dimiliki individu dan keempat yaitu, segala bentuk status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik²⁶. Dalam hal ini, modal sosial menjadi modal yang cukup menarik untuk peneliti lihat dan tinjau lebih jauh. Bourdieu mendefinisikan bahwa modal sosial aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk social capital (modal sosial)²⁷.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi,

²⁵Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, LkiS Yogyakarta, 2003 Hlm.205

²⁶ Abd. Halim, *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya* (Yogyakarta: Lp2b, 2014), Hlm.108

²⁷ *Ibid*, Hlm.109

pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

1.5.2 Modalitas dan Kontestasi Politik

Pemilu merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dkitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat

ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan „versi dunia sosial yang resmi“.

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi²⁸. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara

1.5.3 Komunikasi Politik

Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi *politics* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata Komunikasi Politik berasal dari kata *politics* menjadi *politer* yang berarti hak hak kewarganegaraan²⁹. Menurut Gabriel Almond : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem

²⁸ Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, LKiS Yogyakarta, 2003, Hlm.205

²⁹ Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989),hal.108

politik. *"All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication."*

Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik³⁰. Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (*who gets what, when, how*). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh orang-orang yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan³¹.

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Dan juga Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya.

1. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

³⁰ Ali novel. *Peradaban komunikasi politik*, (Bandung: remaja rosdakarya 1999), hlm. 120

³¹ Ardial, *Komunikasi Politik*. (Jakarta barat: PT. Indeks. 2010). Hlm. 23

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat³². Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus adalah:

a) Retorika Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *rhetorica*, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak (*khalayak*)³³.

b) Agitasi Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu *agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan dan dalam bahasa Inggris, *agitation*. Menurut Harbert Blumer yang dikutip oleh Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat, kemudian menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa³⁴.

c) Propaganda Politik

³² Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 65.

³³ *Ibid.*, Anwar Arifin hlm. 68

³⁴ *Ibid.*, Anwar Arifin hlm. 66

Propaganda (menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah suatu salah bentuk kegiatan yang sudah lama dalam bidang politik. Yaitu dengan melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam bentuk kegiatan keagamaan (umat katolik), yaitu pada tahun 1622, Paus Gregorius XV, membentuk suatu komisi cardinal yaitu congregation de propaganda fide, untuk menambahkan keimanan kristiani³⁵.

d) Kampanye Politik

Bentuk kampanye komunikasi ini yang paling menarik dan semarak dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi³⁶. Ada berbagai macam kampanye politik diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya dilakukan dalam bentuk “imbauan kepada massa dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu: media elektronik, media cetak, atau poster³⁷.

Kedua, kampanye interpersonal, adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya “dilakukan oleh para kandidat (atau istrinya, kerabat dekat, dan juru bicara utama)

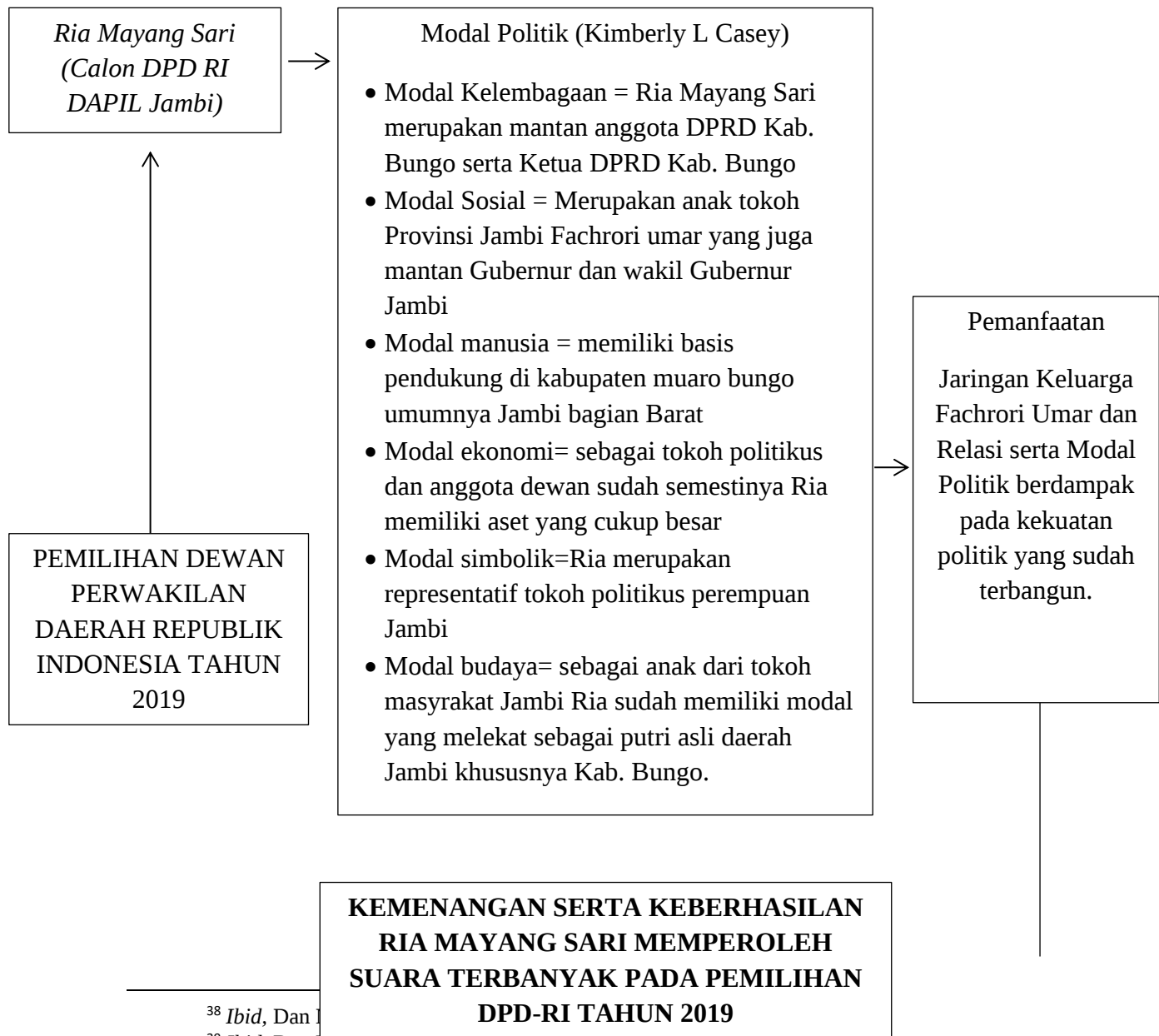
³⁵ *Ibid*, Anwar Arifin hlm. 66

³⁶ Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm. 173.

³⁷ *Ibid*, Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, Hlm. 195

dalam setting yang relative informal³⁸. *Ketiga*, kampanye organisasi. Didalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah “mengarahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon pejabat: serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, lobby konsumen, pencinta lingkungan.” Hal tersebut semuanya dilakukan agar suara mengarah kepada kandidat yang berkompetensi dalam pemilu³⁹.

1.6 Kerangka Pikir



³⁸ Ibid, Dan

³⁹ Ibid, Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, Hlm. 200

Penelitian dilakukan untuk menganalisis strategi kemenangan Ria Mayang Sari selaku tokoh politik perempuan Provinsi Jambi dalam memenangkan pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD-RI) tahun 2019 lalu. Menganalisis strategi serta peranan penting dari faktor-faktor pendukung seperti modal politik dari pribadi Ria dalam menaikkan elektabilitas serta menarik perhatian para pemilih sehingga Ria mampu memperoleh suara terbanyak dalam memenangkan pemilihan Dewan perwakilan daerah dari Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah⁴⁰. Penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, dengan wawancara terstruktur dan sebagiannya. Selanjutnya penelitian naturalistik kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah yaitu lapangan dan mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berfokus pada faktor yang mempengaruhi kemenangan Ria Mayang Sari dalam *personal branding* serta menaikkan citra diri dari Ria Mayang Sari. Bagaimana strategi yang dilakukan Ria Mayang Sari dalam

⁴⁰ Le xy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm 6

membangun eksistensinya agar mampu menaikan perhatian publik terhadap dirinya mengingat status keluarga Ria yang merupakan anak mantan dari wakil gubernur dan Gubernur Jambi H. Fachrori Umar. Yang juga merupakan tokoh masyarakat Jambi dan Kabupaten Bungo. Penelitian ini penting untuk di kaji karena sosok Ria merupakan tokoh politik perempuan Jambi yang berhasil memenangkan pemilihan DPD-RI dengan perolehan suara terbanyak dari petahana yang sering mencalonkan diri pada pemilihan DPD-RI, padahal Ria tidak begitu di kenal masyarakat Jambi umumnya namun di kabupaten Bungo begitu memiliki kharismatik. Untuk itu peneliti berfokus pada peran media sosial pribadinya dalam mem-*branding* sosok Ria Mayang sari.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti pada daerah dimana Ria Mayang Sari mampu memperoleh suara terbanyak pada daerah pemilihan Ria Mayang Sari di Kabupaten Bungo, serta menganalisis melalui observasi di masyarakat bagaimana sosok Ria Mayang Sari begitu di kenal di tengah masyarakat kabupaten Bungo.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

a) Data Skunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang dibutuhkan dalam data penelitian yang dilakukan⁴¹.

b) Data Primer

⁴¹ *Ibid*, Lexy J. Moleong, Hlm. 132

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti⁴².

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode yang digunakan kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti⁴³.

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yang meliputi :

Tabel 1.7
Daftar Informan

No	Informan	Keterangan/ Parpol	Alasan

⁴² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 209.

⁴³ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 156

1	Ria Mayang Sari	Anggota DPD-RI Dapil Provinsi Jambi	Tokoh Utama dalam penelitian ini, karena bagaimana peran yang dilakukannya dalam memenangkan pemilihan DPD-RI.
2	Lahmudin, ST	Tokoh masyarakat dan budaya kabupaten Bungo	Memiliki kapasitas untuk menjawab bagaimana sosok Ria dari perspektif masyarakat Bungo asli dan budaya di Kabupaten Bungo.
3	H.M Subhan, S.Ag.,M.H	Ketua KPU Provinsi Jambi	Mengetahui dan memiliki data perolehan suara DPD Jambi dan pemilu 2019.
4	Dr. Pahrudin	Akademisi/Pengamat Politik	Mengetahui pandangan pengamat terkait Pemilu, tokoh politik perempuan.
5	Indra Sakti, S.IP.	Tokoh pemuda dan pemerhati demokrasi dan pemilu Bungo	Memiliki kapasitas untuk menjawab bagaimana sosok Ria dari perspektif pemuda bungo dan forum demokrasi di Kabupaten Bungo.
6	Erwin, S.P	sekretaris kemenangan calon anggota DPD atas nama Elviana.	Sebagai data pembading dari tim pemenang calon yang lain.
7	Tri Kurniawan, M.Pd.	Tokoh adat dan Masyarakat Kabupaten Bungo	Memiliki kapasitas untuk menjawab bagaimana sosok Ria dari perspektif adat di Kabupaten Bungo.
8	Saidina Umar	Tokoh Masyarakat dan Rio Desa Sungai Arang.	Sebagai pandangan masyarakat pada sosok Ria

9	Imran Suganda,	Tokoh masyarakat Adat Sungai Penuh.	Memiliki kapasitas untuk menjawab bagaimana sosok Ria dari perspektif masyarakat Kerinci karena di dua kabupaten/kota ini Ria mampu memperoleh suara terbanyak.
10	Beberapa Masyarakat umum (Masing-masing 1 Orang) di Kabupaten Bungo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.		Agar mengetahui bagaimana pandangan masyarakat umum atas kehadiran dan cara agar Ria diterima oleh masyarakat luas pada umumnya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan wawancara, observasi dan kepustakaan/dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur⁴⁴. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Juga menggunakan wawancara semi-struktur dengan tujuan untuk

⁴⁴ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 186

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya⁴⁵.

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (Reliabilitas dan kesahihan Validasinya)⁴⁶. Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain⁴⁷. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

⁴⁵ Op.cit. Sugiyono. Hlm. 233

⁴⁶ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

⁴⁷ Op.cit. Sugiyono, hlm.240

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴⁸. Peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dijelaskan dalam buku karya Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data⁴⁹. Terdapat empat tipe triangulasi yaitu :

- a) Trigulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b) Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.

⁴⁸ *Op.cit.* Sugiyono, hlm.248

⁴⁹ *Op.cit.* Sugiyono, hlm.241

- c) Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
- d) Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.